

Minta Fasilitasi

Mendagri

Aset Singkawang

SINGKAWANG- Ketua DPRD Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie menyatakan lembaganya telah menyampaikan surat ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Kalimantan Barat, agar memfasilitasi penyelesaian masalah aset kota ini dengan Kabupaten induk.

"Kita telah mengirim surat ke Depdagri terkait masalah aset yang tak kunjung rampung," kata Tjhai Chui Mie, belum lama ini kepada wartawan, saat diruangnya.

Menurutnya, diharapkan dengan legislatif juga mengusahakan permasalahan ini, dan hal yang sama dilakukan eksekutif, diharapkan agar masalah ini bisa cepat selesai.

"Mudah-mudahan dengan legislatif ataupun eksekutif mencoba jalan masing-masing masalah aset segera tuntas," katanya.

Walikota Singkawang, Hasan Karman, belum lama ini juga menyatakan pihaknya telah sampaikan ke provinsi untuk menjadi mediasi selesaikan masalah aset dengan Kabupaten induk (Sambas).

Karena, pada dasarnya, jika kabupaten atau kota tidak menemukan titik terang, menurutnya provinsi bisa membantu.

"Kita juga sudah sampaikan masalah aset ke provinsi agar menjadi

mediasi. Namun memang belum ada kabar terbaru akan hal itu," katanya.

Dalam Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Singkawang mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan tahun anggaran 2010, fraksi di legislatif hampir semua menyoroti masalah ini. Karena hal itu menjadi masalah tersendiri saat audit dilakukan BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat.

Bahkan, fraksi DPRD Kota ini pun mendesak kepada walikota untuk segera menyelesaikan masalah ini. Mereka beranggapan, jika masalah itu selesai, maka opini yang diberikan BPK dari Wajar Dengan Pengecualian berubah menjadi Wajar Tanpa Pengecualian.

Karena memang, berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Kalbar yang diterima pemerintah daerah pada 30 Juni 2011. Dimana daftar tanah

yang belum di dukung dengan alas hak yang memadai sebanyak 154 lokasi tanah, dengan luas 1,801 meter persegi lebih dengan nilai lebih dari Rp26 miliar.

Kemudian tanah yang masih dalam proses sertifikasi 37 lokasi dengan luasan 306,951 meter persegi dengan nilai lebih dari Rp5 miliar. Serta masih ada sebanyak 111 lokasi tanah dengan luas 1.481.898 meter persegi masuk dalam daftar tanah yang belum disertifikasi dengan nilai harga lebih dari Rp18 miliar. (fah)



Tjhai Chui Mie



Kita telah mengirim surat ke Depdagri terkait masalah aset yang tak kunjung rampung"